



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

**TAHUN
2027**

**SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Paser
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Renja Tahun 2027 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Periode 2025-2029. Sebagai tahun ketiga dalam implementasi Renstra, tahun 2027 menjadi momentum krusial untuk memastikan akselerasi pencapaian target-target kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pelayanan administratif.

Penyusunan Rancangan Awal ini dilakukan dengan memperhatikan evaluasi hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya serta menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Fokus utama Sekretariat Daerah pada tahun 2027 diarahkan pada:

1. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan** yang akuntabel dan berbasis digital.
2. **Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah** dalam mendukung program unggulan kepala daerah.
3. **Optimalisasi Pelayanan Administratif** dan sarana prasarana penunjang tugas pokok fungsi pemerintahan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dalam forum Konsultasi Publik sangat kami harapkan untuk menyempurnakan dokumen ini menjadi Rencana Kerja yang aplikatif dan akuntabel.

Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Tana Paser, 2025
Sekretaris Daerah

Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19661211 198609 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	6
2.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	28
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	58
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	59
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	80
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	80
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	81
3.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER	98
BAB V PENUTUP	103

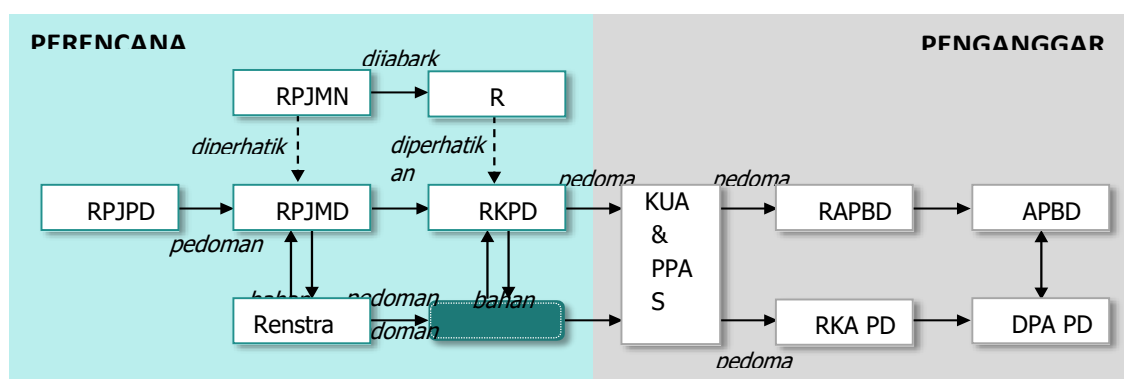
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) disebutkan dalam Pasal

273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Penyusunan Rancangan Awal (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2027. Dimana penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2025.

Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 5) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun harus dilakukan seiring dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029, sehingga pada penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2027 merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan **3 program, 18 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja** sedangkan yang **tidak memenuhi target kinerja terdapat 4 kegiatan**

dengan 5 Sub Kegiatan. Secara rinci diuraikan sebagai berikut evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja" dengan target tahun 2024 sebesar 100%, realisasi sebesar 100% (capaian 98,64%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 99,69%, 94,01% dan 96,66%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 98,82% (capaian 92,31%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 93,47%, 100,00%, 101,79% dan 100,00%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 0% (capaian 00,00%). Pada kegiatan ini terdapat 1 (Satu) Sub Kegiatan, dimana target indikator kinerja dari 1 (Satu) Sub Kegiatan tidak mencapai target karena tidak dilaksanakan

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi" dengan target tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 39,00% (capaian 85,28%). Pada kegiatan ini terdapat 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana salah satu sub kegiatan tidak mencapai target indikator kinerja dari 2 (Dua) Sub Kegiatan telah mencapai 78,00% dan 00,00 %.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah" dengan target

tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100,00% (capaian 85,83%). Pada kegiatan ini terdapat 8 (delapan) Sub Kegiatan, dimana target indikator kinerja dari 8 (delapan) Sub Kegiatan telah mencapai 100,00%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, dan 100%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 0% (capaian 00,00%). Pada kegiatan ini terdapat 1 (Satu) Sub Kegiatan, dimana target indikator kinerja dari 1 (Satu) Sub Kegiatan tidak mencapai target karena tidak dilaksanakan.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 96,42%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100%, dan 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Pemeliharaan BMD" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 91,11%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100%, dan 100%.

9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 83,96% (capaian 84,61%). Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (Empat) Sub Kegiatan telah mencapai 90%, 37,50%, 100% dan 108,33%.

10. Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi" dengan target tahun 2024

sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 85,11%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100 % dan 100%.

11. Penataan Organisasi

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 91,28% (capaian 100%). Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 5 (lima) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100%, 100%, 100% dan 100%.

12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 96,59% (capaian 100%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Administrasi Tata Pemerintahan

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 98,03% (capaian 100%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 92,89% (capaian 101,93%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 76,47%, 96% dan 133,33%.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi" dengan target tahun 2024 sebesar 100%

dan realisasi sebesar 93,83% (capaian 103,49%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 143,47%, 75% dan 92%.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 99,67% (capaian 98%). Pada kegiatan ini terdapat 2 (Dua) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 2 (Dua) Sub Kegiatan telah mencapai 96% dan 100%.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 99,01% (capaian 86,04%). Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 4 (empat) Sub Kegiatan telah mencapai 70,83%, 83,33%, 100% dan 90%.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 96,89% (capaian 100%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 100%, 100% dan 100%.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Hasil Proses PBJ" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 84,81% (capaian 153,96%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 214,36%, 114,17% dan 133,33%

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah "Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam" dengan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 99,35% (capaian 101,67%). Pada kegiatan ini terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dimana masing-masing target

indikator kinerja dari 3 (tiga) Sub Kegiatan telah mencapai 105%, 100% dan 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun lalu (tahun n-2/tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/tahun 2025) adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut:

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
s/d TAHUN 2025 KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
						Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/6x100	10	11=5+7+9	12=10/4x10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan pelayanan Sekretariat		76	72	74	78,38	105,92	76	226,38	297,87
4.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		100	100	100	100	100,00	100	300	300,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	6	6	6	100	6	18	300,00
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		12	12	12	12	100	12	36	300,00

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (Tahun n - 3)	Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan realisasi Capaian target Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dengan Tahun Berjalan (Tahun Berjalan/n-1)	
						Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2024 (Tahun n - 2)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025 (Tahun berjalan (n-1))	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	5	5	5	100	5	15	500,00
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		100	100	100	98,82	98,82	100	298,82	298,82
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2268	2.268	2120	2268	106,98	2268	6.804	300,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		725	950	967	12	1,24	12	974	134,34
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	-	0	0	#DIV/0!			
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	2	2	2	100	2	6	300,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	12	12	2	16,67	2	16	133,33
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Eakil Kepala Daerah yang difasilitasi		100	73.13	100	167,92	167,92	100	341,05	341,05

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		28	28	28	28	100	28	84	300,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		10	8	10	9	90	10	27	270,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8	1	8	3	37,5	8	12	150,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12	12	12	13	108,33	12	37	308,33
4.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah		100	-	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0,00
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3	-	0	0	#DIV/0!	-	-	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	83,36	100	39,00	39,00	100	222,36	222,36
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100	115	100	78	78,0	100	293	293,00
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		180	131	180	0	0	180	311	172,78
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100	81,08	100	100,00	100,00	100	281,08	281,08
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		16	16	16	16	100	16	48	300,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		17	17	17	17	100	17	51	300,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		25	18	25	25	100	25	68	272,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30	5	30	30	100	30	65	216,67
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		9	23	9	9	100	9	41	455,56
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		150	150	150	150	100	150	450	300,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150	150	150	150	100	150	450	300,00
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	-	12	12	100	12	24	200,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah		100	100	0	0,00	#DIV/0!	100	200	200,00

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		12	12	0	0	#DIV/0!	12	24	200,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100	75	100	100,00	100,00	100	275	275,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor		1300	-	0	0	#DIV/0!	1100	1.100	84,62
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	12	100	12	36	300,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	15	5	5	100	5	25	500,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Tidak ada didalam renstra	12	12	12	100	0	24	#VALUE!
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	221,11	100	100,00	100,00	100	421,11	421,11
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3	20	3	3	100	3	26	866,67
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20	29	20	20	100	20	69	345,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	6	3	3	100	3	12	400,00
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi		100	97	100	100,00	100,00	100	297,22	297,22
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12	13	12	12	100,00	12	37	308,33
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12	12	12	12	100,00	12	36	300,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12	10	12	12	100,00	12	34	283,33
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik		100	96,86	100	100,00	100,00	100	296,86	296,86
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		41	41	41	41	100	41	123	300,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		4	4	4	4	100	4	12	300,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2	2	2	2	100	2	6	300,00
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan		1	1	1	1	100	1	3	300,00

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

	Publik & Tata Laksana	Tata Laksana									
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		3	3	3	3	100	3	9	300,00
4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	100	100	100,00	100,00	100	300	300,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana		12	12	12	12	100	12	36	300,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		36	36	12	12	100	36	84	233,33
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi tugas pimpinan		12	12	12	12	100	12	36	300,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana dan Terfasilitasi		100	100	100	94,07	94,07	100	294,07	294,07
		Nilai LPPD		3,33	2,77	2,75	2,77		3,07	8,61	258,56
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi		100	100	100	100	100,00	100	300	300,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		23	23	8	8	100	23	54	234,78
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		9	9	9	9	100	9	27	300,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3	3	3	3	100	3	9	300,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi		100	142,16	100	76,33	76,33	100	318,49	318,49
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		357	946	750	1076	143,47	750	2.772	776,47
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		100	4	4	3	75	4	11	11,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		15	102	100	92	92	874	1.068	7120,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan		100	100	100	101,93	101,93	100	301,93	301,93
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		750	357	357	273	76,47	357	987	131,60
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		4	100	100	96	96,00	100	296	7400,00

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		882	15	15	20	133,33	15	50	5,67
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi		60	83,33	54	98,00	181,48	Rp54	235,33	392,22
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MoU Kerja sama Dalam Negeri yang terlaksanakan		30	25	25	24	96	30	79	263,33
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah MoU yang telah dievaluasi pada Pelaksanaan Kerja sama		30	25	12	12	100	30	67	223,33
4.01.03.2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti		100	100	100	110,42	110,42	100	310,42	310,42
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ		100	158,52	100	153,96	153,96	100	412,48	412,48
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1757	2367	2200	4716	214,36	1722	8.805	501,14
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		252	580	247	282	114,17	247	1.109	440,08
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		12	12	12	16	133,33	12	40	333,33
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi		100	100	100	86,04	86,04	100	286,04	286,04
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		20	20	24	17	70,83	20	57	285,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		42	42	48	40	83,33	42	124	295,24
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		20	20	32	32	100	20	72	360,00
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		25	125	30	27	90	25	177	708,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan		100	100	100	100,00	100,00	100	300	300,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		2	12	2	2	100	2	16	800,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		12	12	12	12	100	12	36	300,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12	12	12	12	100	12	36	300,00

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam		100	100	100	101,67	101,67	100	301,67	301,67
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		39	35	40	42	105	35	112	287,18
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		32	25	35	35	100	30	90	281,25
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		39	31	40	40	100	35	106	271,79

Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran murni dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 256.384.931.909 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 236.124.072.719 atau 92,10%, dengan sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) sebesar Rp 20.260.859.190,- Adapun rincian realisasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	Rp 256.384.931.909	Rp 236.124.072.719	92,10%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 6.738.935.695	Rp 6.119.319.562	90,81%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3.717.878.688	Rp 3.153.111.557	84,81%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3.717.878.688	Rp 3.153.111.557	84,81%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.293.525.189	Rp 1.215.672.709	93,98%
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp 1.644.866.704	Rp 1.305.433.340	79,36%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 779.486.795	Rp 632.005.508	81,08%
Bagian Perekonomian	Rp 1.039.551.594	Rp 1.029.214.310	99,01%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 1.039.551.594	Rp 1.029.214.310	99,01%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 347.943.400	Rp 339.817.200	97,66%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 293.294.518	Rp 292.841.265	99,85%
Perencanaan dan	Rp 293.294.518	Rp 293.244.557	99,98%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp 105.019.158	Rp 103.311.288	98,37%
Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 1.286.419.899	Rp 1.246.403.498	96,89%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 1.286.419.899	Rp 1.246.403.498	96,89%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp 367.724.840	Rp 357.141.906	97,12%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 269.433.759	Rp 261.468.678	97,04%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 649.261.300	Rp 627.792.914	96,69%
Bagian Sumber Daya Alam	Rp 695.085.514	Rp 690.590.197	99,35%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 695.085.514	Rp 690.590.197	99,35%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp 337.544.514	Rp 336.447.837	99,68%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 178.742.000	Rp 176.839.756	98,94%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 178.799.000	Rp 177.302.604	99,16%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Rp 33.784.711.881	Rp 31.586.672.816	93,49%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Bagian Tata Pemerintahan	Rp 2.801.675.791	Rp 2.746.489.694	98,03%
Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 2.801.675.791	Rp 2.746.489.694	98,03%
Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 1.486.428.092	Rp 1.454.304.937	97,84%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 685.254.909	Rp 670.883.716	97,90%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 629.992.790	Rp 621.301.041	98,62%
Bagian Hukum	Rp 1.995.862.120	Rp 1.872.787.924	93,83%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.995.862.120	Rp 1.872.787.924	93,83%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 666.029.100	Rp 665.742.324	99,96%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 1.129.770.700	Rp 1.007.195.600	89,15%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 200.062.320	Rp 199.850.000	99,89%
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 28.370.564.501	Rp 26.352.811.314	92,89%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 28.370.564.501	Rp 26.352.811.314	92,89%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 19.799.195.501	Rp 18.218.960.970	92,02%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 8.028.658.000	Rp 7.637.426.534	95,13%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Rp 542.711.000	Rp 496.423.810	91,47%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Kesejahteraan Masyarakat			
Bagian Kerjasama	Rp 616.609.469	Rp 614.583.884	99,67%
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp 616.609.469	Rp 614.583.884	99,67%
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 319.223.000	Rp 317.620.464	99,50%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp 297.386.469	Rp 296.963.420	99,86%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 215.861.284.333	Rp 198.418.080.341	91,92%
Bagian Organisasi	Rp 1.762.867.759	Rp 1.609.063.189	91,28%
Penataan Organisasi	Rp 1.762.867.759	Rp 1.609.063.189	91,28%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 453.115.894	Rp 451.549.358	99,65%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 251.670.976	Rp 234.059.226	93,00%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 755.923.827	Rp 637.301.473	84,31%
Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik & Tata Laksana	Rp 96.391.360	Rp 88.032.624	91,33%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 205.765.702	Rp 198.120.508	96,28%
Bagian Umum	Rp 171.599.804.082	Rp 157.675.638.692	91,89%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 380.108.000	Rp 324.165.961	85,28%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 197.640.000	Rp 194.655.590	98,49%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 182.468.000	Rp 129.510.371	70,98%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 50.447.897.081	Rp 43.300.866.144	85,83%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 609.197.400	Rp 510.444.800	83,79%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23.678.998.860	Rp 22.682.193.944	95,79%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1.523.070.625	Rp 933.508.237	61,29%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 1.478.961.790	Rp 453.252.100	30,65%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 68.094.800	Rp 63.672.500	93,51%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 16.672.410.000	Rp 12.919.642.760	77,49%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 6.265.213.606	Rp 5.591.465.803	89,25%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 151.950.000	Rp 146.686.000	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 87.296.751.062	Rp 84.169.808.170	96,42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 3.209.461.006	Rp 2.770.956.952	86,34%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 75.941.890.056	Rp 73.481.243.218	96,76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 8.145.400.000	Rp 7.917.608.000	97,20%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 29.441.464.020	Rp 26.824.390.200	91,11%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.205.299.500	Rp 788.842.885	65,45%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.891.700.062	Rp 1.359.475.080	71,87%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 26.344.464.458	Rp 24.676.072.235	93,67%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 2.661.647.918	Rp 2.265.267.367	85,11%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 1.405.072.454	Rp 1.182.477.266	84,16%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 950.636.864	Rp 844.188.241	88,80%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 305.938.600	Rp 238.601.860	77,99%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.371.936.001	Rp 791.140.850	57,67%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.121.936.001	Rp 724.448.600	64,57%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 250.000.000	Rp 66.692.250	26,68%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 6.971.789.666	Rp 6.733.704.026	96,59%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 6.971.789.666	Rp 6.733.704.026	96,59%
Fasilitasi Keprotokolan	Rp 2.757.891.129	Rp 2.639.541.653	95,71%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 1.830.157.068	Rp 1.757.185.324	96,01%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 2.383.741.469	Rp 2.336.977.049	98,04%
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp 35.526.822.826	Rp 32.399.674.434	91,20%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 560.355.980	Rp 552.190.397	98,54%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 394.516.480	Rp 393.300.753	99,69%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 65.471.500	Rp 61.547.684	94,01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 100.368.000	Rp 97.341.960	96,99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 33.716.466.846	Rp 31.124.821.143	92,31%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 33.084.901.311	Rp 30.547.370.450	92,33%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 49.374.293	Rp 48.206.900	97,64%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 563.766.242	Rp 510.825.513	90,61%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp 18.425.000	Rp 18.418.280	99,96%

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
		RP	(%)
1	2	3	4
Kuungan Akhir Tahun SKPD			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.250.000.000	Rp 722.662.894	57,81%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 650.000.000	Rp 175.162.894	26,95%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 600.000.000	Rp 547.500.000	91,25%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat Daerah

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi Pemerintahan, kelembagaan, tatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
 - f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Bagian Tata Pemerintahan

- (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berkendudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Hukum

- (1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
 - penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bagian Kerja Sama

- (1) Bagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan evaluasi kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan evaluasi kerja sama;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Bagian Perekonomian

- (1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Usaha Milik Daerah dan Sadan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.1 (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. menyusunpenyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. penyiapan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. menyusun dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bagian Sumber Daya Alam

- (1) Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Sumber daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - d. terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Administrasi Umum

- (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

1. Bagian Umum

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Organisasi

- (1) Bagian Organisasi dipimpin berkedudukan di bawah dan Administrasi Umum.
- (2) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis (1) jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3.1 (1) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. melaksanakan penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Penyetaraan Jabatan

- (1) Subkoordinator Jabatan Fungsional merupakan jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Subkoordinator Jabatan Fungsional diberikan kegiatan tugas dan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dalam jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. STAF AHLI

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;
 - b. mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan ditingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Tabel TC.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah.			70	70	72	74	76	77	78	76	80	
2	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			25	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		8	6	6	6	6	6	6	6	6	
4	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dok		3	12	12	12	12	12	12	12	12	
5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		6	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln		2268	2268	2268	2268	2268	2268	2120	2268	2268	
8	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		725	725	725	725	725	725	967	725	725	
9	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok		12	12	2	12	12	0	0	12	12	
10	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan		12	2	2	2	2	2	2	2	2	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
11	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		4	12	2	12	12	12	12	12	12	
12	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah			100	100	100	100	100	-	-	100	100	
13	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok		3	3	2	3	3			3	3	
14	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi			100	100	100	100	100	83,36	39	100	100	
15	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok		100	100	165	100	100	155	78	100	100	
16	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		180	180	180	180	180	131	0	180	180	
17	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	100	100	100		100	100	100	
18	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		16	16	16	16	16	16	16	16	16	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		17	17	17	17	17	17	17	17	17	
20	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		25	25	25	25	25	18	25	25	25	
21	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		40	30	5	30	30	5	30	30	30	
22	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		30	9	30	9	9	23	9	9	9	
23	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		60000	150	150	150	150	150	150	150	150	
24	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		9	150	150	150	150	150	150	150	150	
25	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok		30	12	12	12	12	0	0	12	12	
26	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah			150	100	100	100	100	100	0	100	100	
27	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		150	12	12	12	12	12	0	12	12	
28	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			7500	100	100	100	100	75	100	100	100	
29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		150	1000	1	1100	1200	0	0	1200	1200	
30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan		100	5	15	5	5	15	5	5	5	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan				12	12	12	12	12	12	12	
33	Persentase Pemeliharaan BMD			12	100	100	100	100	221,11	100	100	100	
34	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		100	3	25	3	3	20	3	3	3	
35	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		1000	20	6	20	20	29	20	20	20	
36	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		12	3	6	3	3	6	3	3	3	
37	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi			5	100	100	100	100	73,13	167,92	100	100	
38	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		100	28	28	28	28	28	28	28	28	
39	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		3	10	10	10	10	8	9	10	10	
40	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang		20	8	8	8	8	1	3	8	8	
41	Jumlah Orang yang Menerima Dana	Orang/Bulan		3	12	12	12	12	12	13	12	12	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	n											
42	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi			100	100	100	100	100	97	100	100	100	
43	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		28	12	12	12	12	13	12	12	12	
44	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		14	12	12	12	12	12	12	12	12	
45	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket		12	12	12	12	12	10	12	12	12	
46	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik			12	100	100	100	100	100	100	100	100	
47	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		100	83	41	41	41	41	41	41	41	
48	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		12	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		12	2	2	2	2	2	2	2	2	
50	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		12	1	1	1	1	1	1	1	1	
51	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		100	3	3	3	3	3	3	3	3	
52	Persentase Pelaksanaan Protokol dan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Komunikasi Pimpinan												
53	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keptokolan	Laporan		41	12	12	12	12	12	12	12	12	
54	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan		41	36	36	12	36	36	12	36	36	
55	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan		41	12	12	12	12	12	12	12	12	
56	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti			100	100	100	100	100	106,37	106,37	100	100	
57	Nilai EPPD			2,75	2,75	2,75	3,07	3,20	2,77	2,77	3,20	3,20	
58	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
59	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen		23	23	23	8	23	23	8	23	23	
60	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen		75	9	9	9	9	9	9	9	9	
61	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen		15	3	3	3	3	3	3	3	3	
62	Jumlah Koordinasi, Fasilitas dan Monev dalam menyusun Kebijakan			100	100	100	100	100	100	101,93	100	100	
63	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		42	357	357	357	357	357	273	357	357	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen		42	100	100	100	100	100	96	100	100	
65	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		4	15	15	15	15	15	20	15	15	
66	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi			100	100	100	100	100	142,16	76,33	100	100	
67	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen			750	760	750	750	946	1076	750	750	
68	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		1	4	2	4	4	4	3	4	4	
69	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen		100	866	100	874	878	102	92	878	878	
70	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi			150	50	54	54	56		98	56	56	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		12	30	30	25	30	25	24	30	30	
72	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan		150	30	30	12	30	25	12	30	30	
73	Persentase Fasilitasi Kebijakan Prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang Di tuangkan dalam Produk Hukum Daerah			100	100	100	100	100	114,63	114,63	100	100	
74	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi			100	100	100	100	100	100	86	100	100	
75	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		13	20	20	20	20	20	17	20	20	
76	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		10	42	42	42	42	42	40	42	42	
77	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen		5	20	20	20	20	20	32	20	20	
78	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen		10	25	25	25	25	25	27	25	25	
79	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan			5	100	100	100	100	100	100	100	100	
80	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		3	2	23	2	2	12	2	2	2	
81	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	Laporan		3	12	9	12	12	12	12	12	12	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Evaluasi Program Pembangunan												
82	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		1	12	3	12	12	12	12	12	12	
83	Persentase Hasil Proses PBJ			100	100	100	100	100	158,52	153,96	100	100	
84	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		10	1688	1705	1722	1740	2367	4716	1740	1740	
85	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		41	242	245	247	250	580	282	250	250	
86	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		15	12	12	12	12	12	16	12	12	
87	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam			100	100	100	100	100	100	101,67	100	100	
88	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen		100	30	35	35	37	35	42	37	37	
89	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen		100	25	25	30	32	25	35	32	32	

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		SPM / Standar Nasional		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				IKK	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen		100	30	30	35	37	30	40	37	37	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, yaitu diantaranya :

1. Penyelenggaran Pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip – prinsip Good Governance;
2. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;
3. Pemantaun dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan Administratif dan Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Optimalisasi Kapasitas dan kualitas Pelayanan Aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah;

Sementara itu, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, diantaranya yaitu :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkositensi perencanaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
2. Terdapatnya kegiatan – kegiatan yang masih tumpang tindih antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser;
3. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahliannya

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

TABEL T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PASER

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	SEKRETARIAT DAERAH					76.492.837.480						76.492.837.480
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Paser	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah.		76	45.230.621.091	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Paser	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah.		76	45.230.621.091
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100	101.920.682	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paser	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100	101.920.682
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	46.362.985	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	46.362.985
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dok	12	16.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Paser	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dok	12	16.625.000

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	38.932.697	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	38.932.697
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	28.484.370.637	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	28.484.370.637
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B In	2268	27.538.923.104	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B In	2268	27.538.923.104
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	725	464.031.565	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	725	464.031.565

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	12	400.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	12	400.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	17.384.403	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	17.384.403
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	64.031.565	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	64.031.565
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup		100	46.143.695	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat		100	46.143.695

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			Sekretariat Daerah						Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	3	46.143.695	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	3	46.143.695
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	211.979.920	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paser	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	211.979.920
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	100	146.855.071	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	100	146.855.071
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	180	65.124.849	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	180	65.124.849
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat		100	6.176.991.667	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paser	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	6.176.991.667

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	91.507.315	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Paser	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	91.507.315
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	319.137.276	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	319.137.276
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	534.053.879	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	534.053.879
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	1.302.445.014	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	1.302.445.014
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	49.155.458	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paser	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	49.155.458

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150	1.052.462.109	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	150	1.052.462.109
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	2.715.297.351	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	2.715.297.351
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	12	112.933.265	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Paser	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	12	112.933.265
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paser	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		100	10.456.784	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paser	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		100	10.456.784
	Pengadaan Mebel	Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	10.456.784	Pengadaan Mebel	Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	10.456.784
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100	3.472.881.923	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100	3.472.881.923
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1300	10.456.784	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1300	10.456.784

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.032.752.751	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.032.752.751
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.429.672.388	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.429.672.388
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Pemeliharaan BMD		100	2.315.845.108	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paser	Persentase Pemeliharaan BMD		100	2.315.845.108
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	374.593.364	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paser	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	374.593.364

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	1.029.083.459	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	1.029.083.459
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	912.168.285	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paser	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	912.168.285
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi		100	1.103.694.128	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi		100	1.103.694.128
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	304.690.026	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	304.690.026

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10	67.029.239	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10	67.029.239
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	209.135.675	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	209.135.675
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	12	522.839.188	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	12	522.839.188
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi		100	1.861.770.325	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paser	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi		100	1.861.770.325
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket	12	813.935.343	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang	Paket	12	813.935.343

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			yang Disediakan						Disediakan			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	680.769.247	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	680.769.247
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	367.065.735	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paser	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	367.065.735
	Penataan Organisasi	Paser	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik		100	829.964.044	Penataan Organisasi	Paser	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik		100	829.964.044
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	41	267.452.740	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Paser	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	41	267.452.740
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4	259.277.731	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4	259.277.731
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Dokumen	2	140.032.124	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Paser	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Dokumen	2	140.032.124

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			Birokrasi						Birokrasi			
	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	37.833.500	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Paser	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	37.833.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	125.367.949	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	125.367.949
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	1.718.296.306	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100	1.718.296.306
	Fasilitasi Keprotokolan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	720.171.150	Fasilitasi Keprotokolan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	720.171.150
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	503.034.039	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	503.034.039
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	495.091.117	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Paser	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	495.091.117

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti		100	30.026.132.914	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti		100	30.026.132.914
			Nilai LPPD		3,33				Nilai EPPD		3,33	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi		100	888.536.120	Administrasi Tata Pemerintahan	Paser	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi		100	888.536.120
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	23	286.843.581	Penataan Administrasi Pemerintahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	23	286.843.581
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	9	314.310.633	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	9	314.310.633
	Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	287.381.906	Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	287.381.906
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Paser	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam		100	28.362.938.700	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Paser	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam		100	28.362.938.700

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			menyusun Kebijakan						menyusun Kebijakan			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	357	17.783.961.840	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	357	17.783.961.840
	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	10.329.697.587	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	10.329.697.587

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11		
	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	15	249.279.273	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	15	249.279.273		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi		100	501.882.120	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Paser	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi		100	501.882.120	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	750	172.684.895		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Paser	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	750	172.684.895
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	4	205.368.096		Fasilitasi Bantuan Hukum	Paser	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	4	205.368.096

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	882	123.829.129	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Paser	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	882	123.829.129
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Paser	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi		60	272.775.974	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Paser	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi		60	272.775.974
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	30	121.956.423	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	30	121.956.423
	Evaluasi Kerjasama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	30	150.819.551	Evaluasi Kerjasama	Paser	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	30	150.819.551
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Paser	Persentase Fasilitasi Kebijakan Prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang Di tuangkan dalam Produk Hukum Daerah		100	1.236.083.475	Program Perekonomian dan Pembangunan	Paser	Persentase Fasilitasi Kebijakan Prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang Di tuangkan dalam Produk Hukum Daerah		100	1.236.083.475

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi		100	239.809.605	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi		100	239.809.605
	Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20	80.747.284	Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	20	80.747.284
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	42	58.070.703	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	42	58.070.703
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	20	47.055.527	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	20	47.055.527
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan	Dokumen	25	53.936.091	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	25	53.936.091

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			BLUD									
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan		100	281.043.588	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Paser	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan		100	281.043.588
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokume n	2	105.302.070	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokume n	2	105.302.070
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	75.184.275	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	75.184.275
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	100.557.243	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	100.557.243
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Persentase Hasil Proses PBJ		100	538.894.533	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Persentase Hasil Proses PBJ		100	538.894.533
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokume n	1757	126.851.244	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokume n	1757	126.851.244

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	252	302.142.492	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	252	302.142.492
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	109.900.797	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	109.900.797
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam		100	176.335.749	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Paser	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam		100	176.335.749
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan,dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga	Dokumen	39	79.044.788	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan,dan Perikanan	Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	39	79.044.788

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian (Rp) 2026	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			Kerja									
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	32	48.458.827	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	32	48.458.827
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	39	48.832.134	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	39	48.832.134

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2027 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2026, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi ini diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis saja atau Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah, sedangkan untuk Sekretariat Daerah tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan tidak menampung aspirasi dari masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai unsur staf, dan termasuk dalam urusan penunjang pemerintah serta berperan sebagai middle line dan supporting staff yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan membantu dalam rangka penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pembinaan Kepegawaian ASN dan pelayanan administratif.

Pada tahun 2027, tidak ada usulan masyarakat yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah kabupaten Paser. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tabel TC.3.2
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2027 dari
Pemangku Kepentingan kabupaten

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
TIDAK ADA USULAN					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Sembilan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Permasalahan pelayanan tugas dan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Paser memiliki relevansi yang kuat dengan misi-misi Kementerian Dalam Negeri. **Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi**

Telah ditetapkan Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu: **“Berani untuk Kaltim Berdaulat”** Visi Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan kedalam lima misi yakni :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 mengusung Visi **“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”**. Selanjutnya dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Kabupaten Paser 4 (Empat) Misi, yaitu :

- PERTAMA : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
- KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFESIEN MELALUI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN
- KETIGA : MENGURANGI KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
- KEEMPAT : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026,

Tujuan yang digunakan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025 s/d 2029 ada 1 (satu) yaitu :

Meningkatkan kualitas kebijakan publik pemerintah daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu: **Indeks Kepuasan Masyarakat** Sedangkan Sasaran yang digunakan mulai tahun 2024 ada 3 (tiga) sasaran yaitu: **Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum** dengan memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu **1. Rata-rata Nilai AKIP Perangkat Daerah dan 2. Indeks kepuasan layanan administrasi umum** dan **Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesra** dengan memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan, 2. Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang kesra yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan.**

Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan” memiliki 1 (satu) indicator sasaran yaitu : **Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan.**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam

merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser. Secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program /kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai melaksanakan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2027 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tahun 2027 adalah sebanyak **18** (delapan belas) kegiatan, dan **60** (enam puluh) sub Kegiatan;

2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebesar Rp **145.090.032.930,-** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian:

Adapun rencana Program dan Kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel TC.33 sebagai berikut

Tabel TC. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028 KABUPATEN PASER

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	LOKASI	RENCANA TAHUN N (2026)			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N + 1 (2027)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEKRETARIAT DAERAH				76.492.837.480				76.492.837.480
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah.	Kab. Paser	76	45.230.621.091	APBD		80	45.230.621.091
Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	100	101.920.682	APBD		100	101.920.682
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6	46.362.985	APBD		6	46.362.985
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Paser	12	16.625.000	APBD		12	16.625.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Kab. Paser	5	38.932.697	APBD		5	38.932.697

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	100	28.484.370.637			100	28.484.370.637
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	2268	27.538.923.104	APBD		2268	27.538.923.104
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Paser	725	464.031.565	APBD		725	464.031.565
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	12	400.000.000	APBD		12	400.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser	2	17.384.403	APBD		2	17.384.403

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	12	64.031.565	APBD		12	64.031.565
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Kab. Paser	100	46.143.695			100	46.143.695
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	3	46.143.695	APBD		3	46.143.695
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Paser	100	211.979.920			100	211.979.920
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Paser	100	146.855.071	APBD		100	146.855.071
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	180	65.124.849	APBD		180	65.124.849
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	100	6.176.991.667			100	6.176.991.667

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	16	91.507.315	APBD		16	91.507.315
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	17	319.137.276	APBD		17	319.137.276
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	25	534.053.879	APBD		25	534.053.879
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	30	1.302.445.014	APBD		30	1.302.445.014
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	9	49.155.458	APBD		9	49.155.458
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Paser	150	1.052.462.109	APBD		150	1.052.462.109
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	150	2.715.297.351	APBD		150	2.715.297.351
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser	12	112.933.265	APBD		12	112.933.265

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Paser	100	10.456.784			100	10.456.784
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Paser	12	10.456.784	APBD		12	10.456.784
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kab. Paser	100	3.472.881.923			100	3.472.881.923
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser	1300	10.456.784	APBD		1300	10.456.784
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	12	2.032.752.751	APBD		12	2.032.752.751
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5	1.429.672.388	APBD		5	1.429.672.388
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Kab. Paser	100	2.315.845.108			100	2.315.845.108
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Paser	3	374.593.364	APBD		3	374.593.364

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	20	1.029.083.459	APBD		20	1.029.083.459
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Paser	3	912.168.285	APBD		3	912.168.285
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	Kab. Paser	100	1.103.694.128			100	1.103.694.128
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	28	304.690.026	APBD		28	304.690.026
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	10	67.029.239	APBD		10	67.029.239
Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	8	209.135.675	APBD		8	209.135.675

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Paser	12	522.839.188	APBD		12	522.839.188
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	Kab. Paser	100	1.861.770.325			100	1.861.770.325
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	813.935.343	APBD		12	813.935.343
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	680.769.247	APBD		12	680.769.247
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Paser	12	367.065.735	APBD		12	367.065.735
Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	Kab. Paser	100	829.964.044			100	829.964.044
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Paser	41	267.452.740	APBD		41	267.452.740

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	4	259.277.731	APBD		4	259.277.731
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	2	140.032.124	APBD		2	140.032.124
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Paser	1	37.833.500	APBD		1	37.833.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	3	125.367.949	APBD		3	125.367.949
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	100	1.718.296.306			100	1.718.296.306
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Paser	12	720.171.150	APBD		12	720.171.150
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Paser	12	503.034.039	APBD		36	503.034.039
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Paser	12	495.091.117	APBD		12	495.091.117

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Kab. Paser	100	30.026.132.914			95	30.026.132.914
	Nilai LPPD	Kab. Paser	3,33				100	
Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan yang terfasilitasi	Kab. Paser	100	888.536.120			3,33	888.536.120
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Paser	23	286.843.581			100	286.843.581
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Paser	9	314.310.633	APBD		23	314.310.633
Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Paser	3	287.381.906	APBD		9	287.381.906
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	Kab. Paser	100	28.362.938.700	APBD		3	28.362.938.700
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Paser	357	17.783.961.840			100	17.783.961.840

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Paser	100	10.329.697.587	APBD		357	10.329.697.587
Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Paser	15	249.279.273	APBD		100	249.279.273
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	Kab. Paser	100	501.882.120	APBD		15	501.882.120

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Paser	750	172.684.895			100	172.684.895
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kab. Paser	4	205.368.096	APBD		750	205.368.096
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Paser	882	123.829.129	APBD		4	123.829.129
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	Kab. Paser	60	272.775.974	APBD		882	272.775.974
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Paser	30	121.956.423			60	121.956.423
Evaluasi Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Paser	30	150.819.551	APBD		30	150.819.551
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Fasilitas Kebijakan Prioritas Perekonomian dan Pembangunan yang Di tuangkan dalam Produk Hukum Daerah	Kab. Paser	100	1.236.083.475	APBD		30	1.236.083.475
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	Kab. Paser	100	239.809.605			4,62	239.809.605

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Paser	20	80.747.284			95	80.747.284
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Paser	42	58.070.703			100	58.070.703
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Paser	20	47.055.527			100	47.055.527
Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kab. Paser	25	53.936.091	APBD		20	53.936.091
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD tertib dalam Adminiatrasi Pembangunan	Kab. Paser	100	281.043.588	APBD		42	281.043.588
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Paser	2	105.302.070	APBD		20	105.302.070
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Paser	12	75.184.275	APBD		25	75.184.275

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Paser	12	100.557.243			100	100.557.243
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	Kab. Paser	100	538.894.533	APBD		2	538.894.533
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	1757	126.851.244	APBD		12	126.851.244
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Paser	252	302.142.492	APBD		12	302.142.492
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Paser	12	109.900.797			100	109.900.797
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Paser	100	176.335.749	APBD		1757	176.335.749
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	Kab. Paser	39	79.044.788	APBD		252	79.044.788

Rancangan Awal Renja 2027
Sekretariat Daerah

	Tenaga Kerja							
Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Paser	32	48.458.827	APBD		12	48.458.827
Koordinasi,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Paser	39	48.832.134			100	48.832.134

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PASER

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Program Perekonomian dan Pembangunan

2. KEGIATAN

1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah
9	Penataan Organisasi
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11	Administrasi Tata Pemerintahan
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
14	Fasilitasi Kerjasama Daerah
15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

3. SUB KEGIATAN

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
28	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

29	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
34	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
35	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
36	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
37	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
38	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
39	Fasilitasi Keprotokolan
40	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
41	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
42	Penataan Administrasi Pemerintahan
43	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
44	Fasiltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
45	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
46	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
47	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
48	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
49	Fasilitasi Bantuan Hukum
50	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
51	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
52	Evaluasi Kerjasama
53	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
54	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
55	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
56	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

57	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
58	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
59	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
60	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
61	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
62	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027, Sekretariat Daerah Kabupaten Paser mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp. 76.492.837.480,-(Tujuh puluh enam milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk pembiayaan 3 (tiga) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Renja awal Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Renja awal Sekretariat Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027;
2. Dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Paser;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 untuk setiap triwulannya;

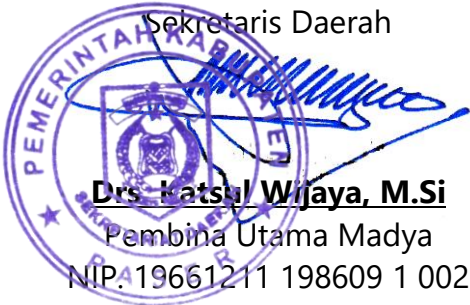
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser tahun 2027 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Paser.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2027.

Tana Paser, 2025

Sekretaris Daerah



Drs. Katsul Wijaya, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661211 198609 1 002